

B 45

**JURNAL**  
**"SUPREMASI HUKUM"**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. W.R. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371;

Telp. (0736)20653, 21170, Fax. (0736) 20653;

Laman: [www.fh.unib.com](http://www.fh.unib.com) / E-mail: [jurnalsupremasihukum@gmail.com](mailto:jurnalsupremasihukum@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Sulistyo Budi Ambarini, SH.,MHum

NIP : 196009231987032001

Jabatan : Ketua Penyunting

Menerangkan bahwa artikel yang berjudul:

"Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Di Pasar Modal Menjelang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal", oleh Dr. Tito Sofyan, SH.,MHum (NIP. 196006041986031004)

Dimuat pada Jurnal "Supremasi Hukum" Volume 23 Nomor 2 Agustus 2013 ISSN : 1693-766X, yang pada saat ini masih dalam proses penerbitan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan.

Bengkulu, 02 Maret 2014

Ketua Penyunting,



Dr. Nur Sulistyo Budi Ambarini, SH.,MHum

NIP. 1960092319987032001

Konsep Perlindungan Hukum  
Bagi Pemodal Di Pasar Modal Menghadang Perubahan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Oleh :  
Tito Sofyan<sup>1</sup>

### SUMMARY

*Protection for investor is the crucial issue because it many evidence misuthe of company s resources for extensive. Moreover, there are also the case of IPO, stock exchange, in securities fraud, market and insider trading. Stock market is about trust, if it lose, the market will wild and affect the other sector, m economic sector. Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar (UUPM) one of the legal order to support the development of have regulations that very important in activities, in secu especially the regulation of protection of investor is a base on still problems that have not been regulated properly, and the needs for further explanation for the existing norm.*

*The concept that developed to increase the protection for is to make UUPM give stronger legal framework in the fu regulation of the protection of investor s right as the guara law that is needed, by it is to maximize the transparency of information for go public company that have not go public; 2) Make Good Corporate Governance refer to the prin 2001 as reference for UUPM to make stock market to increa transparency of information and to increase the development of reporting system and the disclosure of data e*

### A. PENDAHULUAN

Perlindungan pemodal merupakan satu kata kunci di Pas merupakan kebutuhan dasar pemodal yang harus dijami nyadi dalam peraturan -peraturan. Sejak November 1995, Pasa Modal Indonesia mengalami perubahan fundamental yang pengesahan Undang Nomor 1995 tentang Pasar Modal dan berlaku awal 1996. Dengan lahirnya UU Pasar Modal ini diharapkan terhadap pemodal dapat ditingkatkan dan dengan sendirinya kepercayaan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ini. Selain itu, memberikan legal yang kokoh dengan kekuatan

---

<sup>1</sup>Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar pada Fakultas H Bengkulu

hukum yang lebih tinggi dibanding -nya<sup>2</sup>, juga harus sebelum meningkatkan transparansi dan perlindungan terhadap pemodal.

Sebagian perusahaan yang menawarkan sahamnya melalui Pasar Modal, sebelum menawarkan sahamnya merupakan perusahaan yang saham dan manajemennya dikuasai oleh keluarga yang Setelah menawarkan sebagian sahamnya, terdapat beberapa perusahaan menganut pola manajemen yang hampir sama dengan sebelum menawarkan sahamnya. Ini semestinya tidak boleh terjadi dan penawaran umum berarti perusahaan menawarkan sahamnya melalui Pasar Modal menyebabkan jumlah pemodal yang bersangkutan bertambah besar. Konsekuensi lebih lanjut dari perubahan status ini semakin intensnya perhatian berbagai pihak terhadap pelaporan oleh perusahaan sehingga dengan demikian perusahaan diharapkan dituntut untuk lebih<sup>3</sup> transparan.

Perlindungan pemodal yang saham di pasar modal adalah hal yang krusial karena pada banyak negara ditemukan bukti adanya penyalahgunaan *expropriation* sumber daya perusahaan yang berlangsung secara sistematis. *Expropriation* dilakukan oleh pengelola perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan aset perusahaan, praktek *transper pting* semestinya, pengalangan keuangan yang tidak berkualitas dalam perusahaan, pembayaran gaji atau komisi yang berlebihan pada manajemen.

Perlindungan yang dimaksudkan tidak untuk memberikan kompensasi bagi pemodal yang mengalami kerugian oleh karena misa- runan harga saham di bursa, akan tetapi lebih dikaitkan dengan informasi yang lengkap dan akurat kepada para pemodal. Dengan informasi ini diharapkan para pemodal dapat mengetahui keadaan pasar yang penting artinya sebagai informasi yang *publik* dalam mengambil keputusan investasi.

<sup>2</sup>UU Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa; Keppres Nomor 52 Tahun 1952 tentang Pasar Modal berisikan peraturan-peraturan.

<sup>3</sup>I Putu Gede Arma Satrio. *Pasar Modal di Indonesia*. Sad Satria Bhakti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 91.

<sup>4</sup>Akmal Syakhro. *Best Practice Corporate Governance*. Komite Nasional Perbankan Indonesia. No. 06 Th. XXXII Juni 2003.

Selain itu, banyak kasus pasar modal yang muncul seperti kasus hilangnya, kasus sekuritas, laporan palsu, dan insider trading. Kasus-kasus tersebut merugikan kepentingan Pemo- seharusnya dilindungi. Tidak bisa terlepas dari ku- berfungsinya otoritas pasar modal (Bapepam Pas- Modal Lembaga Keuangan) yang belum melakukan *enforcement* secara konsisten, sebabnya bisa saja karena belum peratur yang mengaturnya secara proporsional, bisa pertentangan norma, atau norma yang mengaturnya kurang je-

Mekanisme perdagangan saham di pasar modal merupakan maka dari itu perlindungan dan kepastian hukum mutlak dibutuhkan. Pasar modal sebagai suatu pusat ekon- mendapat kepercayaan masyarakat akan runtuh, dan akan sektor lain. Oleh sebab itu, pasar modal harus diawasi secara ketat.

Di dalam Laporan Tahunan 2011, Ketua Bapepam me- kan :

&.. Di tahun 2011, jumlah pemeriksaan yang ditangani Bapepam mengalami peningkatan 130 kasus di tahun 2010, menjadi 178. Dari jumlah 178 kasus tersebut diantaranya telah selesai dan dikenakan sanksi administratif oleh Bapepam perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak melakukan pelanggaran, 4 kasus ditutup demi hukum karena adanya pelanggaran terhadap peraturan di bidang pasar modal, 81 kasus telah selesai pada tahap proses p- masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses le- kasus masih dalam proses Pemeriksaan. Dari 178 kasus kasus terkait itra dan lembaga Efek, 78 kasus terkait Emit Perusahaan Publik, dan 19 kasus terkait pelanggaran di b- investasi.

Fuad Rahmany mengemukakan bahwa Undang Undang perlu direvisi, karena selama ini Bapepam dalam memui pelaksanaan tugasnya. Sehingga, penyelidikan yang dilakuka- nya tuntas. Ada keterbatasan hukum, sehingga manipulasinya. Dengan adanya revisi Undang Undang Pasar Modal tersebut,

<sup>5</sup>Terry M. Chuppe dan Michael Atkinson, *Regulation of Securities Markets So- Rescue Trend and their Implications For Emerging Markets*, Paper, The world bank, Washington D.C. Jusuf Anwar 4-5 p. Cit. hlm.

<sup>6</sup>Bapepam Annual Report 2011 184.

mudah menyelesaikan kasus, ~~isepair transaksi~~ sehingga itu dengan revisi Undang-Undang Pasar Modal, Bapepam akan dapat mengikuti MoU regulator pasar modal (*International of Security Organization*) dimana penyelidikan yang harusnya membuka data dengan pihak negara lain akan menjadi lebih mudah." Kita pernah ke Hong Kong, penyelidikan buntu karena data di sana tidak bisa diberikan. Dengan MoU, Bapepam tidak memiliki hak untuk melihat rekening dan dicurigai melakukan pelanggaran. Bapepam tidak punya hak akses *account*. Dengan revisi Undang-Undang Pasar Modal akan memudahkan Bapepam dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penyelidikan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana hak-hak pemodal yang dapat dikembangkan dalam pengaturan perlindungan hukum pemodal di dalam Undang-Undang Pasar Modal?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, di dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, disebut bahan hukum yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang bersifat normatif ini, digunakan terutama untuk mengkaji hukum yang terkait dengan substansi hukum positifnya serta hanya terhadap norma, tetapi juga asas dan nilai yang terkandung di dalamnya).

## D. PEMBAHASAN

### 1. Esensi perlindungan pemodal

Esensi dari perlindungan terhadap pemodal adalah untuk Pasar Modal yang teratur seimbang dan efisien sehingga akan melindungi kepentingan pemodal terhadap praktik bisnis yang tidak sehat.

---

<sup>7</sup>Pernyataan Ketua Bapepam Rahmany, di Gedung BEI, Jakarta (12/8/2009) <http://economy.okezone.com/read/2009/08/21/278/247492/> merupakan modifikasi disempurnakan akses 21 Agustus 2010.



jujur. Perlindungan yang dapat diberikan pemerintah dalam s adalah memberikan jaminan bagi pemodal untuk memperoleh lengkap mengenai resiko investasi yang dihadapi

Terlepas dari resiko normal yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan pemodal, resiko lain yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan Risiko yang termasuk dalam resiko tersebut menyangkut:

*Pertama*, integritas finansial para *permanend fund* untuk melindungi pemodal dalam hal integritas finansial para peran Bapepam harus menetapkan persyaratan *moda* *slam* minimum dan seperti standar pencatatan, penyimpanan saham, pengawasan, minimum. Perlindungan terhadap *keagaintan* *kompe* *di* *ur* *da* *tur* dalam UUPM ke depan berupa dana *jampio* *and* *lagi* *pe* *an* *o* *e* *l* *fund*

Kedupenipuan saham (*securities fraud*) sudah se cara jelas didefinisikan dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP). Ak tetapi dalam rangka menjalankan fungsinya untuk melindungi perlu diberi wewenang untuk investigasi dan penyeter pengadilan. Alasan kewenangan tersebut karena mereka teknik tinggi dan memerlukan keahlian khusus untuk dapat m pengadilan. Penipuan saham yang paling umum adalah meng taan yang salah atau yang mengakibatkan suatu pihak beli atau menjual saham. Dalam rangka membatasi eskemung *fraud*, U Pasar Modal harus mengatur sanksi yang berat bagi saja yang tanpa izin bertindak sebagai *insider* Pasar Modal dan bahkan dikenakan sanksi yang lebih berat bagi siapa aktivitas penipuan.

Ketiga manipulasi pasar modal (manipulation) modal di Pasar Modal berhak mengetahui bahwa harga yang dibentuk di bursa merupakan permintaan dan penawaran yang wajar, harga yang dibentuk dari hasil manipulasi. Jika harga yang terbentuk merupakan hasil manipulasi tersebut bukanlah parameter investasi yang tepat. Dalam Undang-undang Bapepam harus memiliki mekanisme memonitor pasar agar dapat

dideteksi kemungkinan adanya aktivitas manipulasi dan menipu yang berakibat merugikan masyarakat.

Keterbukaan di Pasar Modal. Keterbukaan di Pasar Modal bertujuan kepada keterbukaan perusahaan yang akan memasarkan saham di Pasar Modal atau emiten. Emiten dituntut untuk mengungkapkan informasi mengenai keadaan bisnisnya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Informasi yang harus diinformasikan haruslah informasi yang kebenarannya, dibawah tanggung jawab emiten. Apabila terdapat informasi material untuk diketahui masyarakat yang ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkan menimbulkan kerugian bagi pemodal, maka emiten bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat pemodal. Dalam ini terdapat transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi yang implisit terkandung unsur perlindungan bagi masyarakat pemodal.<sup>8</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Pemodal Melalui Keterbukaan Informasi

Prinsip dasar UU Pasar Modal adalah bahwa pemerintah terlibat dalam keputusan investasi, sehingga peran pemerintah adalah memberikan jaminan bahwa pemodal dapat memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi. Yang demikian yang menjadi prinsip dasar keterbukaan informasi yang diadopsi oleh seluruh Pasar Modal di dunia.

Sebelum dilakukan penawaran saham di Pasar Modal dan peraturan Bapepam, harus mewajibkan suatu pernyataan pendaftaran tentang keuangan yang telah diaudit, gambaran umum perusahaan, uraian mengenai emiten, evaluasi tentang risiko usaha, keterangan tentang pendapat ahli mengenai sejarah umum perusahaan, dan keterangan lain yang penting dan relevan dengan ancaman hukuman tertentu bila melanggar ketentuan. Menawarkan saham tanpa menyetujui pendaftaran kepada Bapepam atau melakukannya sebelum pendaftaran menjadi efektif merupakan tindakan melawan hukum dengan ancaman sanksi y

<sup>8</sup>Ary S, Op. cit. hal. 98.

Setelah penawaran umum dinyatakan efektif, emiten telah menyampaikan informasi secara faktual dan fakta relevan dan penting mengenai kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat pemodal oleh emiten pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan dan informasi yang berupa informasi mengenai peristiwa penting yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

Prinsip *disclosure* terjadi jika informasi yang disampaikan kepada pemodal merupakan informasi yang memadai bagi pemodal, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Syarat *disclosure* dapat diterapkan, kesalahan atau ketidakcukupan *disclosure* dapat mengakibatkan hukuman, denda, atau bahkan pidana, baik bagi emiten, penjamin emisi perusahaan, komisaris, pemegang saham utama, akuntan atau konsultan hukum, notaris, penilai yang terlibat dalam penawaran umum, dan orang-orang yang sahamnya dapat diperdagangkan di Pasar Modal.<sup>9</sup>

### 3. Perlindungan Hukum Pemodal Melalui *Principle of Corporate Governance*<sup>10</sup>

Penerapan tata kelola perusahaan ini tidak hanya dipelembungkan dunia usaha secara umum tetapi juga secara khusus sangat penting dalam pengembangan industri Pasar Modal. Sebagai regulator Pasar Modal memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan menerbitkan peraturan. Hingga saat ini, Peraturan Bapepam telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Corporate Governance Principles*. Namun demikian praktik internal *Corporate Governance* terus berkembang demikian pesat sehingga menuntut dilakukannya pengawasan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang terutama UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>9</sup>bidhlm 1-104.

<sup>10</sup>Tim Studi, Studi Penerapan *Principles of Corporate Governance* Dalam Peraturan Bapepam Mengadopsi *Corporate Governance Principles* Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2004.



Sebagai acuan praktik sistem tata kelola yang baik Kom ngacu pada prinsip yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* merupakan salah satu lembaga memegang peranan penting dalam pengembangan untuk pemerintah maupun dunia usaha. *OECD* mengklarifikasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* pada Mei 1999 dan telah direvisi pada Desember 2004. *Principles of Corporate Governance* dikeluarkan pada tahun 2004 mencakup:

- Memastikan kerangka peraturan yang efektif;
- Hak Pemegang Saham dan Fungsi Utama Kepemilikan Saham;
- Perlakuan yang sama terhadap Saham;
- Peran *Shareholder* dalam *Corporate Governance*;
- Keterbukaan dan Transparansi;
- Tanggung Jawab Dewan (Komisaris dan Direksi).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan dalam pengkajian baik teoritis maupun prakteknya khususnya *Prinsip-prinsip* bertujuan untuk melihat sejauh mana ketentuan dan peraturan di Bursa dapat secara berkelanjutan mempromosikan *Corporate Governance*.

#### 4. Perlindungan Hukum Melalui Demutualisasi Bursa Indonesia

Wacana tendang mutualisasi Bursa Efek di Indonesia telah beberapa lama. Dalam rangka demutualisasi, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya telah terlebih dahulu melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Demutualisasi pada intinya adalah pemisahan kepemilikan suatu Bursa Efek. Struktur kepemilikan bursa berorientasi pada kepemilikan yang terbatas pada anggota bursa, menjadi struktur yang lebih luas. Proses demutualisasi akan dilaksanakan perubahan dari orientasi *member-oriented* menjadi berorientasi laba.

Salah satu negara di Asia yang telah menerapkan demutualisasi bursa adalah Hong Kong. Demutualisasi di Hong Kong dilaksanakan melalui penggabungan dua Bursa Efek: *Exchange and Clearing Limited* dan *Hong Kong Futures Exchange Limited*, perusahaan *HK Securities Clearing Company Limited*, *H.K. Clearing Corporation Limited*.

*Clearing House Limited, pada<sup>11</sup> bulan Maret 2000.*

Ada beberapa factor yang menyebabkan dan-demutualisasi bursa di Hong Kong: evolusi global, kecenderungan perdagangan, kemajuan teknologi, pasar yang semakin terbuka bursa berlandaskan keanggotaan, struktur pasar yang terfragmentasi. Dengan demutualisasi dapat meningkatkan transparansi dan sekaligus kualitas tata kelola bursa sebagai suatu badan hukum. Demutualisasi juga memungkinkan bursa untuk meningkatkan partisipasinya.

Pada umumnya bursa yang memisahkan demutualisasi tidak menjadi *membership organization* tidak lagi berpredikat *Self Regulatory Organization (SRO)*. Walaupun demikian, bursa dapat memperoleh beberapa keuntungan melalui langkah demutualisasi, antara lain:

1. Bermotivasi mencari *profit ( motive )* sehingga diharapkan mendorong *corporate governance* yang lebih baik, dan menciptakan manajemen bursa yang semakin profesional dan kompetitif.
2. Kepemilikan saham tidak terbatas pada anggota, dan memungkinkan pengalihan saham secara bebas jika dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Seperti beberapa bursa di luar negeri, sebaiknya demutualisasi Bursa Efek Indonesia dan lembaga penunjang lainnya seperti Kustodian Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan (KPEF) dilakukan segera dilaksanakan. Beberapa faktor yang mendorong demutualisasi bursa adalah kebutuhan dana pengembangan *Good Corporate Governance*, pengembangan produk, pengembangan infrastruktur, peningkatan likuiditas, dan pengembangan Modal yang berkelanjutan.

Terdapat empat model demutualisasi Bursa Efek dan lembaga penunjang yang dapat diterapkan dalam demutualisasi bursa: *(1) direct demutualization*, *(2) investment holding company*, *(3) operating holding company*, dan *(4) SRO (Self Regulatory Organization)*.

Model *direct demutualization* merupakan demutualisasi masing-masing lembaga secara terpisah. Akibatnya kepemilikan bursa dan lembaga penunjang akan terpisah.

<sup>11</sup> Irwan Adi Putra, Demutualisasi Bursa Efek Indonesia, lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi, [http://www.google.co.id/#hl=id&q=demutualisasi+bursa+saham+oleh+dr.+irwandiputra&as\\_s=24](http://www.google.co.id/#hl=id&q=demutualisasi+bursa+saham+oleh+dr.+irwandiputra&as_s=24) di akses 24 Februari 2012

<sup>12</sup> ibid.

<sup>13</sup> ibid.

tidak sama, sehingga memungkinkan adanya lembaga yang tidak terintegrasi karena perbedaan *Investing Model* *company* adalah demutualisasi dimana pemegang saham Bursa lembaga penunjang *Es* *business* mendirikan perusahaan induk yang berfungsi sebagai pemegang saham mayoritas. Perusahaan induk melakukan kegiatan investasi dan menetapkan kebijakan umum. Pada *holding company*, perusahaan induk akan melakukan kegiatan mendukung kegiatan perusahaan anak, yaitu melakukan kegiatan pendukung bagi perusahaan anak, namun perusahaan induk melakukan kegiatan sebagai *Service Holding* *Company*, perusahaan induk menjalankan kegiatan yang mendukung perusahaan anak dan melakukan kegiatan sebagai SRO.

Pemilihan alternatif model demutualisasi dapat diidentifikasi dan model demutualisasi lembaga Bursa Efek negara lain. Berikut perlu diperhatikan antara lain: aspek kepemilikan, aspek tata kelola, aspek operasional, aspek sumber pendapatan, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi. Berdasarkan kajian BAPEPAM tahun 2004, model demutualisasi *Special Holding Company* *Non-SRO* untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia.

## 5. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pelaporan Elektronik (*Electronic Reporting*)

Dalam industri keuangan pada umumnya dan Pasar Modal Indonesia, keberadaan dan kelengkapan informasi merupakan suatu hal yang penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan calon pemodal akan memiliki kesempatan yang luas dalam menentukan pilihan investasinya, jika tersedia informasi yang benar.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Strategi Pengembangan Umum Pasar Modal 2004, penerapan teknologi informasi

<sup>14</sup> Tim Studi Tentang Penyajian Data Elektronik Untuk Pelaku Pasar Modal, *Tentang Penyajian Data Elektronik Untuk Pelaku Pasar Modal*, Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Proyek Peningkatan Pasar Modal, Tahun 2003, hal. 1.

yang sedemikian pesat juga telah mempengaruhi bidang komunikasi. Akibatnya beragamaan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan perubahan yang tajam. Mengantisipasi perkembangan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah menetapkan suatu inisiatif untuk mengembangkan penguasaan teknologi informasi yang dapat mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia. Teknologi tersebut akan diterapkan antar lembaga di Pasar Modal sehingga akan memiliki efek kemandirian. Melalui pengembangan tersebut diharapkan klien perusahaan (individu dan perusahaan) dapat lebih diterima perusahaan yang baik dapat lebih diterapkan.

Salah satu bentuk inisiatif Bapepam adalah mulai dipergunakannya sarana internet dalam penyebaran informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan Pasar Modal oleh Bapepam. Informasi telah disampaikan kepada masyarakat umum dan pemodal dapat diakses secara mudah dan gratis. Informasi yang disajikan diantaranya peraturan, peraturan serta ketentuan Pasar Modal, kegiatan siaran pers, data dan statistik, dan lain-lain. Keseluruhan informasi tersebut dapat dilihat di website Bapepam dengan alamat <http://www.bapepam.go.id>.

Di samping hal tersebut, Bapepam sebenarnya masih membutuhkan untuk meningkatkan akses kepada publik dan pemodal. Salah satu masalah adalah yang berhubungan dengan masalah penyajian keterbukaan yang disampaikan kepada Bapepam oleh para pelaku pasar. Hal ini telah diwajibkan oleh peraturan yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Diumumkan Kepada Publik<sup>15</sup> dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala<sup>16</sup>.

Dalam perkembangannya, Bapepam sampai saat ini belum memiliki sistem pelaporan penyajian informasi yang harmonis dan terpadu untuk menyampaikan informasi mengenai Keterbukaan Informasi dan Laporan Keuangan Berkala.

<sup>15</sup>Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep-001/2002 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

<sup>16</sup>Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep-002/2002 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

sud. Selama ini Pihak pelapor masih memanfaatkan cara manual dalam memberikan hasil pelaporan kepada Bapepam. Cara ini belum memberikan hasil yang optimal. Beberapa kendala yang mungkin mengakibatkan hal tersebut adalah belum adanya landasan hukum yang jelas dan mengikat mengenai pelaporan yang terstandar, tata cara dan prosedur pelaporan serta keterbatasan sumber daya yang mendukungnya. Salah satu alternatif yang dapat meningkatkan kemampuan Bapepam dalam menangani pelaporan tersebut adalah pengembangan sistem pelaporan data secara elektronik (*electronic reporting system*).

Sistem tersebut telah diterapkan oleh beberapa lembaga Modal negara lain dan ternyata efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi sehingga dapat dicapai peningkatan keterbukaan informasi yang diharapkan. Pasar Modal sangat mempunyai peranan Pasar Modal bagi-pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Banyak organisasi telah mengandalkan sistem pelaporan (*paper based*) dalam mengumpulkan data dan informasi. Namun ketika untuk pengumpulan data meningkat secara signifikan menjadi lebih kompleks, sistem pelaporan secara manual sudah menjadi masalah. Hal ini berkaitan dengan makin terbatasnya sumber daya yang mengolah laporan tersebut dan kualitas data yang dihasilkan menjadi buruk.

Proses pelaporan secara manual tidak hanya mahal, tapi juga menciptakan keseragaman (membutuhkan waktu penelaahan yang lebih lama *time-consuming*). Setiap data diinput ulang secara manual ke komputer atau data base sehingga akan mengakibatkan keterlambatan informasi secara cepat kepada pemodal.

Pengelola pelaporan elektronik harus meyakinkan bahwa aspek hukum berkesesuaian aspek keamanannya. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah masih jarang nya kaidah hukum yang mendukung pelaksanaan sistem pelaporan elektronik.

Untuk memastikan hal tersebut, pihak penyelenggara sistem pelaporan elektronik harus membandingkan data elektronik dibandingkan dengan data manual.

<sup>17</sup>Tim Studi, Chrm, 3.

konvensional (*case based system*) sebagai alat bukti di dalam masalah hukum. Selain itu masalah yang berkaitan dengan otentifikasi dan integritas perlu mendapat perhatian bagi pihak penyelenggara.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan UUPM ke depan perlu memfokuskan pada lebih kuat mengatur perlindungan terhadap pemodal melalui :

- Transparansi informasi yang maksimal terhadap pemodal akan maupun transparansi sebagai jaminan adanya kepastian yang dibutuhkan oleh pemodal
- Menjadikan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai Prinsip *OECD 2004* sebagai rujukan normatif dalam Pasar Modal.
- Perlindungan hukum pemodal juga dapat dilakukan Bursa Efek, sebab demutualisasi dapat meningkatkan informasi dan sekaligus kualitas tata kelola perusahaan.
- Dalam upaya meningkatkan efektivitas, peraturan sistem pelaporan keuangan dari emiter ke sistem pelaporan dan penyajian data secara *electronic system*

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian memberikan usulan sebagai berikut :

- Agar Presiden bersama DPR sebagai pembentuk melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkait dengan ketentuan mengenai fungsi, powers, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



- dengan OJK namun aturan yang melandasi kinerja sama) sebagai pengawas pasar modal dan bursa penyelenggara dengan aspek penerapan perlindungan terhadap pemodal bisa lebih diperhatikan dan yang diterbitkan kemudian yaitu UU Nomor 21 Tentang Jasa Keuangan dan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan
- b. Masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek hukum lain dari pasar modal se aspek hukum administrasi dan aspek yang terkait prinsip-prinsip GCG yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Syakh ~~Boza~~, *Practice Corporate Governance* Komite Lokal Perbankan Indonesia, No. 06 Th. XXXII Juni 2003.
- Bapepam-~~TLK~~ Studi, Studi Penerapan ~~PERC 2010~~ 4 Dalam Peraturan Bapepam ~~Mengelola~~ *Governance* Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, 2006.
- Bapepam-~~TLK~~, Annual Report 2011
- Fuad Rahmany, Ketua Bapepam <http://www.okezone.com/read/2010/08/12/278/247492/0812278247492-rahman-pasarmodal-asidi-sempurna> kan diakses 21 Agustus 2010.
- Ary Sulta ~~Putu G~~, *Menuju Pasar Modal Modern* Sad Satria Bhakti, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000.
- Iwan ~~Adi~~ ~~Suta~~, Demutualisasi Bursa Efek Indonesia, lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi <http://www.google.co.id/#hl=id&client=ps=demutualisasi+bursa+saham+oleh+dr.+diakses+24+ekap> Pebruari 2012
- Jusu ~~h~~ ~~Ar~~, Kajian Tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Indonesia Dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional Program Doktor Hukum Pascasarjana Universitas Padjad Bandung, 2001.
- Keppres Nomor 52 Tahun 1976 ~~data bgr~~ ~~Rasape~~ ~~Me~~ ~~ubahannya~~.
- Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berk
- Keputusan Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal nomor kep tentang Keterbukaan ~~sil~~ yang Harus Segera Diumumkan K Publik .
- Bapepam-~~TLK~~ Studi, Studi Tentang Penyajian Data Elektronik Untuk Pasar Modal Departemen Keuangan Republik Indonesia, Pengawas Pasar Modal, Proyek Peningkatan Efisiensi Pa 2003
- UU Nomor 15 Tahun 1952 .tentang Bursa